P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

REVITALISASI KEWENANGAN LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH DALAM PENANGANAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19

¹ Muhammad Ridwansyah, ² Fahrul Reza

*Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Sains Cut Nyak Dhien
Alamat: Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 8-9, Kota Langsa, Aceh, 24354*

¹muhammadridwansyah188@yahoo.com, ²fahrulreza178@gmail.com

Abstract

The issue of conveying views, directions, and advice to the Aceh Government, should not actually deviate from the provisions of the Wali Nanggroe Aceh as a giver of considerations that are considered relevant and in accordance with Acehnese identity because in the Aceh Government system the relationship with LWNA is interpreted as collegial, consultative, and advocacy, but so far neither regeling and beschiking policies have been accommodated. The aim of the LWNA revitalization research is part of an effort to find the concept of LWNA activation in dealing with the COVID-19 pandemic and to find an advisory function in the current governance of the Aceh Government. The results of the research, among others, ideally that the Aceh Government, both policies and the Aceh People's Representative Council as the formation of the Aceh Qanun, must involve LWNA, because normatively, this a quo institution is the guardian of the specialties and privileges of the Acehnese people. The livelihood of LWNA is to accelerate the handling of the COVID-19 pandemic so that it can break the chain of the spread of the Covid-19 pandemic, which is currently in the red zone stage in several districts/cities in Aceh.

Keywords: *Revitalization, Institution Wali Nanggroe Aceh, and Covid-19 Pandemic*

Abstrak

Persoalan penyampaian pandangan, arahan, dan nasihat kepada Pemerintah Aceh, sejatinya tidak boleh menyimpangi ketentuan Wali Nanggroe Aceh sebagai pemberi pertimbangan-pertimbangan yang dianggap relevan dan sesuai identitas ke-Aceh-an karena dalam sistem Pemerintah Aceh hubungan dengan LWNA dimaknai sebagai kolejal, konsultatif, dan advokasi namun selama ini tidak diakomodir baik kebijakan *regeling* dan *beschiking*. Tujuan penelitian revitalisasi LWNA bagian dari upaya menemukan konsep aktivasi LWNA dalam penanggulangan pandemi covid-19 dan menemukan fungsi advise dalam tata kelola Pemerintah Aceh saat ini. Hasil penelitian antara lain, idealnya Pemerintah Aceh baik kebijakan berserta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh selaku pembentukan Qanun Aceh harus melibatkan LWNA, karena secara

normatif yuridis lembaga *a quo* ini menjadi penjaga kekhususan dan keistimewaan rakyat Aceh. Penghidupan LWNA dalam untuk mempercepat penanganan pandemi covid-19 sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran pandemi covid-19 yang saat ini diberbagai kabupaten/kota di Aceh sudah masuk tahap zona merah.

Kata kunci: Revitalisasi, Lembaga Wali Nanggroe Aceh, Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN

Paska penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka oleh Hamid Awaluddin selaku Menteri Hukum dan HAM 2004-2007 sedangkan Malek Mahmud selaku Perdana Menteri GAM. Kesepakatan mengakhiri pertikaian konflik yang sudah menghabiskan ribuan nyawa rakyat Aceh, bahkan konflik berkepanjangan selama 32 tahun lamanya. Kesepakatan ini awal mulanya diragukan tetapi karena pengesahan undang-undang mengenai pemerintahan Aceh terlambat, meleset dari Maret 2006 bergeser pada Agustus 2006 pada saat pengesahan. Salah satu kesepakatan dan pemberian Pemerintah Indonesia terhadap Aceh setelah damai adalah pembentukan Lembaga Wali Nanggroe Aceh (LWNA). Klausul 1.1.7., dalam Nota Kesepahaman antara RI dan GAM menguraikan bahwa Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya". Faktanya, kehendak pembentukan awal mula dari Pemerintah Pusat tetapi pada saat proses pembentukan LWNA banyak terjadi pergesekan yang diduga didalangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.¹

Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh "Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat calon, tata cara pemilihan, peserta pemilihan, masa jabatan, kedudukan protokoler, dan ketentuan lain yang menyangkut Wali Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh". Amanah pembentukan LWNA melalui Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengalami kendala, faktanya setelah 6 tahun damai baru dibentuk Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Pengaturan LWNA terus berkembang sudah mengalami perubahan yakni Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe, yang terakhir perubahan ketiga, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Lembaga Wali Nanggroe.²

Pasal 31 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 huruf e. menyampaikan pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya. Dan f. memberikan usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah. Jika, ditelaah ada dua poin penting yang menjadi kewenangan LWNA. Dalam frasa penyampaian pandangan, arahan, dan nasihat kepada Pemerintah Aceh, sejatinya Pemerintah Aceh tidak boleh menyimpangi ketentuan Wali Nanggroe Aceh sebagai pemberi pertimbangan-pertimbangan yang dianggap relevan dan sesuai identitas ke-Aceh-an karena dalam sistem Pemerintah Aceh hubungan dengan LWNA dimaknai sebagai kolegial, konsultatif, dan advokasi.³

¹ Muhammad Ridwansyah, *Perspektif Suku Non Aceh dalam Penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam Kerangka UUD Tahun 1945*, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, (Jakarta, DRPM Kemenristek, 2019), hlm. 1-3.

² Dahlan A. Rahman, "Dynamics and Prospect of Wali Nanggroe Institution Post-Conflict in Aceh: Analysis of Policy and Educational Development", *Emerald Reach Proceeding Series*, Volume 1 Nomor 1, 2019, hlm. 350.

³ Badri Hasan Sulaiman, dkk, "Wali Nanggroe in Aceh: Is he the Real King or the Fake One? A Political Review", *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Volume 12, Nomor 10, 2020, hlm. 735-736

Tetapi, faktanya regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh mengenai pandemi covid-19 tidak ada satupun dimintakan pandangan Wali Nanggroe Aceh. Beberapa regulasi mengenai pandemi covid-19 antara lain: *Pertama*, Keputusan Gubernur Aceh Nomor 360/969/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Skala Provinsi untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019, Instruksi Gubernur Aceh Nomor 04/INSTR/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Aceh, Keputusan Gubernur Aceh Nomor 440/924/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Aceh, Keputusan Gubernur Aceh Nomor 440/1021/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Aceh, Surat Edaran Nomor 440/5944 tentang Larangan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak dalam Upaya Pencegahan Covid-19, Surat Edaran Nomor 440/4820 tentang Cegah Virus Corona melalui Ibadah, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Dari semua aturan tersebut tidak ada sama sekali pertimbangan-pertimbangan Wali Nanggroe Aceh baik diminta atau disarakan.⁴

Hipotesanya, lembaga Wali Nanggroe secara *ius constituendum* bukan saja lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen akan tetapi pada dasarnya penyampaian pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya itu dimaknai revitalisasi kewenangan LWNA dibidang *regeling* dan *beschikking*⁵.

Seharusnya, dengan kewenangan LWNA yang tertera dalam Pasal 31 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 huruf e berkewajiban secara yuridis pertimbangan-pertimbangan, jika tidak maka posisi Wali Nanggroe Aceh sebagai penjaga kekhususan dan keistimewaan sekaligus pemersatu rakyat Aceh tidak esensial dalam tata kelola sistem pemerintahan yang ada di Aceh. Maka uraian-uraian di atas mengajukan pertanyaan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimanakah konsep revitalisasi kewenangan LWNA dalam penanganan pandemi covid-19? *Kedua*, bagaimanakah prospek pertimbangan LWNA sebagai fungsi pemberi pertimbangan dalam penanganan pandemi covid-19?. Sisi lain, secara fungsional menjelaskan Pasal 4 ayat (3) huruf b Majelis Adat Aceh (MAA) dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe menjadi LWNA sebagai fungsi pemberi pertimbangan dalam penanganan pandemi covid-19.⁶

Kemudian, yang menjadi pertanyaan, sejauhmanakah urgensi penelitian ini sehingga pantas untuk dibiayai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia akan diuraikan sebagai berikut. Bahwa kehadiran LWNA tidak bisa dinafikan dari hasil kesepakatan antara Indonesia dan GAM, bahkan pada saat diplomasi, lembaga ini menjadi tawaran khusus dari Pemerintah Indonesia untuk mengajak para petinggi GAM dan ditempatkan disebuah wadah terhormat. Jika poin ini tidak disepakati dengan baik dan benar dalam tataran implementasi, maka akan muncul *new conflict* di Aceh. Selanjutnya, bahwa wujud dari LWNA, frasa sebagai pemersatu

⁴ Tim Humas, "Wali Nanggroe Minta Pemerintah Aceh Jalankan Rekomendasi Unsyiah", diakses melalui <https://unsyiah.ac.id/berita/wali-nanggroe-minta-pemerintah-aceh-jalankan-rekomendasi-unsyiah>, tanggal 23-10-2020. Lihat juga, Tim Redaksi, "Antisipasi Dampak Ekonomi Akibat Covid-19, Wal Nanggroe Minta Jalankan Rekomendasi Unsyiah", diakses melalui <https://aceh.tribunnews.com/2020/10/15/antisipasi-dampak-ekonomi-akibat-covid-19-wali-nanggroe-minta-aceh-jalankan-rekomendasi-unsyiah?page=3>, tanggal 23 Oktober 2020

⁵ Redaksi Acehtrend, "Revisi UUPA, Penyatuan Jabatan Wali Nanggroe dan Gubernur Aceh". diakses melalui <https://www.acehtrend.com/2021/10/11/revisi-uupa-penyatuan-jabatan-wali-nanggroe-gubernur-aceh/>, tanggal 20 Oktober 2021.

⁶ M. Adly Abdullah, 'Kedudukan Wali Nanggroe Setelah Lahirnya UUPA', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 2, Agustus 2016.

rakyat Aceh dalam undang-undang *a quo* akan berdampak fundamental terhadap kesatuan rakyat Aceh disaat sekarang dan yang akan datang, jika tidak dilakukan vitalisasi kewenangan tentu tata kelola pemerintahan di Aceh lepas dari semangat MoU Helsinki. Dua poin tersebut menjadi alasan urgensi penelitian ini, karena keberlangsungan dan kemajuan Aceh tidak bisa dipisahkan dari LWNA dan Wali Nanggroe Aceh;

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, data yang digunakan ada baik data primer dan data sekunder. Data primer berupa fungsionaris hukum yang menjabat secara struktural misalnya peneliti akan mewawancarai (*dept interview*) pejabat struktural atau fungsionaris yang ada sekretariat LWNA untuk mempertanyakan ulang mengenai hakikat yuridis, filosofis, dan sosiologis pada Pasal 31 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Kemudian, peneliti juga akan menelaah ulang dan mengkonfirmasi secara sistematis dan holistik terhadap kewenangan LWNA yang diberikan qanun *a quo* oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).⁷

Terakhir, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer itu akan ditelaah mulai dari Pasal 18B UUD Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, dan MoU Helsinki. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini lebih kepada dokumen-dokumen, baik itu buku-buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian. Misalnya, Laporan Penelitian mengenai perspektif suku non Aceh terhadap penguatan LWNA dalam kerangka UUD Tahun 1945, Jurnal mengenai kedudukan Wali Nanggroe setelah lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh, kemudian yang paling urgen bahwa kehadiran bahan hukum di atas dapat menjelaskan dan menguraikan lebih jauh kewenangan LWNA. Bahan hukum tersier, biasanya dokumen yang dianggap relevan misalnya berita-berita, atau opini-opini dan lain sebagainya. Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Wali Nanggroe Aceh, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di Banda Aceh.⁸

Tiga pendekatan yang digunakan berikut: **Pertama**, pendekatan sejarah digunakan dalam penelitian ini untuk menelaah latar belakang pembentukan kewenangan LWNA, yang dibentuk mulai dari tahun 2012. Kemudian ini juga akan berupaya untuk melihat perkembangan *a quo*, bagaimana proses kelahiran kewenangan, hal ini bertujuan untuk memahami jiwanya dari keberadaan kewenangan yang diberikan. **Kedua**, pendekatan perundang-undangan ini akan berupaya menelaah secara yuridis bagaimana kewenangan itu dibentuk dan dijalankan dengan meneliti dasar-dasar yuridis pembentukan qanun *a quo*. Fokusnya, lebih kepada prinsip-prinsip hukum atau teori-teori hukum yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis dikesimpulan nanti. Terakhir, **ketiga**, pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga pemahaman terhadap doktrin yang berkembang dapat menjadi pijakan atau referensi dalam penelitian revitalisasi kewenangan LWNA.⁹

⁷ Ahmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), 2012, hlm. 12.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Bandung: Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 29.

⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2018), hlm. 78.

PEMBAHASAN

1. Konsep Revitalisasi Kewenangan LWNA Dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Revitalisasi secara bahasa berasal dari kata vital yang diartikan sangat pening misalnya memvitalkan kelancaran perekonomian, dan memvitalkan suatu kewenangan. Ketika ada penambahan kata awalan re-vitali-sasi maka dimaknai sebagai proses, cara, perbuatan menghidupkan atau mengingat kembali. Secara teori revitalisasi lebih sering digunakan pada dunia konstruksi, revitalisasi lebih kepada rangkaian upaya untuk menata kembali suatu kondisi kawasan maupun bangunan yang memiliki potensi dan nilai strategis dengan mengembalikan vitalisasi suatu kawasan yang mengalami penurunan agar kawasan-kawasan tersebut mendapatkan nilai tambah yang optimal terhadap produktivitas ekonomi, sosial dan budaya kawasan perkotaan. Namun revitalisasi dalam hukum merupakan proses atau cara menggiatkan kembali potensi-potensi institusi dalam rangka menghidupkan suatu kewenangan yang sudah berlaku.¹⁰

Revitalisasi dalam penelitian ini lebih kepada kewenangan LWNA dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam mempersatukan rakyat Aceh dalam memutus mata rantai penyebaran pandemi covid-19 yang ada di Aceh. Sisi lain, kemunculan LWNA menuai kontroversi yang begitu banyak di kalangan masyarakat Aceh, salah satunya ialah sebagian rakyat Aceh tidak sepaham dengan posisi Malek Mahmud sebagai Wali Nanggroe Aceh ke-X, kemudian pengukuhan Malek Mahmud sebagai Wali Nanggroe Aceh tidak inprosedural dan tidak memenuhi unsur-unsur di dalam qanun *a quo*. Paling gencar kritikan tersebut yakni ketika kewenangan LWNA dianggap tidak dijalankan oleh Wali Nanggroe Aceh dan sekretariat. Hadirnya konsep revitalisasi ini sebenarnya untuk menjadi stimulus baru tentang keberadaan LWNA ke depan. Bagaimanapun, LWNA menjadi lembaga pemersatu rakyat Aceh, menjadi lembaga penjaga kekhususan dan keistimewaan rakyat Aceh. Artinya, kewenangan lembaga ini harus divitalkan secara holistik, supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang berlarut.¹¹

Revitalisasi kewenangan LWNA bagian dari upaya memvitalkan secara sistematis kewenangan terkait Pasal 31 huruf e dan f Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 agar LWNA ke depan berkontribusi positif terhadap pengelolaan Aceh, dan hubungan Aceh dan Pemerintah Pusat. Kemudian revitalisasi juga akan menghidupkan kembali kewenangan LWNA yang selama ini dianggap tidak lagi berkontribusi bahkan penelitian bersama LWNA akan menemukan kembali potensi Aceh yang sosio-kultural, ke-tamaddun Aceh yang mashyur di zaman lalu.¹²

Selanjutnya, istilah kewenangan berasal dari kata dasar yakni wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak, dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan juga merupakan kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut para ahli wewenang dan kewenangan itu dua hal yang berbeda, jika kewenangan (*authority gezag*) diartikan sebagai kekuasaan formal yang berasal dari peraturan perundang-undangan, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan tersebut. Artinya, di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe*

¹⁰ Donny Michael, "Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 7 Nomor 1, 2016, hlm. 22.

¹¹ Ali Mashuda, "Revitalisasi Keberadaan Fraksi dalam Optimalisasi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat di Bidang Legislasi", *Thesis*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

¹² Hanif Fudin Azhar, "Rekonstruksi Konseptual Peradilan sebagai Revitalisasi Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Volksgeist*, Volume 1 Nomor 1, 2019, hlm. 40.

voegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹³

Legal formal definisi wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Namun secara spesifik wewenang menurut para ahli ialah bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam publik. Kemudian, jika dilihat Pasal 31 qanun *a quo* menggunakan kata kewenangan sebagai kekuasaan formal LWNA, artinya secara yuridis kewenangan yang sudah diberikan oleh negara wajib dijalankan oleh Wali Nanggroe Aceh, tetapi faktualnya kewenangan LWNA ini tidak begitu baik dijalankan oleh sekretariat LWNA, seharusnya setelah amanah yuridis terbentuk maka timbul akibat hukum yang harus ditunaikan.¹⁴

Selanjutnya, makna kewenangan sangat erat kaitannya dengan kekuasaan, kekuasaan juga merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan disamping unsur-unsur lainnya seperti hukum, wewenang, keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, dan kebajikan. Hal ini secara langsung menjadi kewenangan LWNA dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja demi rakyat Aceh. LWNA dan Wali Nanggroe Aceh harus menjadi stimulus keberlanjutan perdamaian di Aceh. Terakhir, agar kewenangan dapat dijalankan maka dibutuhkan *team work* yang ideal atau organ unit dikonsepsikan dengan baik sebagai himpunan jabatan-jabatan dalam organisasi LWNA. Struktural jabatan di sekretariat LWNA harus yang paham hak dan kewajiban sehingga tidak menumpang jabatan struktural semata. Dengan demikian, kewenangan akan mempunyai dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum dalam tataran implementasi LWNA.

Selanjutnya, konsepsi LWNA terlebih dahulu muncul istilahnya Wali Nanggroe di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Keberadaannya ditemukan dalam Pasal 1 angka 3 “Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”.¹⁵ Kemudian, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 sebagai berikut:

- (1) Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe bukan merupakan lembaga politik dan pemerintahan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (3) Hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Secara tekstual, LWNA dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 belum begitu jelas, tidak pendefinisian apakah sebuah lembaga atau hanya sebagai wadah simbolisasi semata tentang kehidupan adat, budaya dan pemersatu saja. Artinya, undang-undang *a quo* tidak diterima oleh GAM pada saat

¹³ Ali Marwan dan Evelyn Martha Julianty, “Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Legislasi*, Volume 15 Nomor 2, 2018, hlm. 1-5.

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 19.

¹⁵ Arief Akbar, “Malek Mahmud Legal Strongmen?”, *Jurnal Logos*, Volume 2 Nomor 1, 2019, hlm. 39.

itu karena masih abstraksi dan tidak menyelesaikan Aceh secara keseluruhan. Kemudian, konsepsi LWNA muncul dalam MoU Helsinki, dan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai berikut: “Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.”¹⁶

Kemunculan pandemi covid-19 menurut *World Health Organization* (WHO) merupakan pandemi global yang diartikan sebagai peristiwa penyebabnya penyakit koronavirus 2019. Secara klasifikasi diberi nama SARS CoV-2, wabah pandemi covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Secara faktual menurut data, hingga 17 September 2020 lebih 29.864.555 orang kasus telah dilaporkan dari 210 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 940.651 orang meninggal dunia dan lebih dari 20.317.519 orang sembuh. Secara medis, virus SARS-CoV-2 diduga menyebar diantara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan (*droplet*) yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh wajah seseorang.¹⁷

Penyakit covid-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar lima hari, tetapi dapat berkisar dari dua hingga empat belas hari. Gejalanya seperti, demam, batuk, dan sesak napas. Kompilasi dapat berupa pneumonia dan penyakit pernapasan akut berat. Tidak ada vaksin atau pengobatan antivirus khusus penyakit ini. Pengobatan primer yang diberikan berupa terapi simptomatik dan suportif. Kemudian alternatif lain dalam hal pencegahan adalah mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dari orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terinfeksi.¹⁸ Artinya, darurat kesehatan yang terjadi di Aceh akan terbantu dengan revitalisasi kewenangan LWNA sekarang dan seharusnya Pemerintah Aceh dalam mengeluarkan kebijakan harus mengkonsultasi ke Wali Nanggroe Aceh sebagai penjaga keistimewaan dan kekhususan Aceh. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat tidak boleh abai dalam mengeluarkan *beleidreigel* terkait Aceh.

2. Pertimbangan LWNA sebagai fungsi pemberi pertimbangan dalam penanganan pandemi covid-19

Pasal 31 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 huruf e. Menyampaikan pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta lembaga-lembaga lainnya dan f. Memberikan usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah. Norma frasa di atas memberikan kewenangan kepada Wali Nanggroe Aceh untuk memberikan pandangan, arah, dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dalam hal Gubernur Aceh selaku Kepala Pemerintah Aceh. Tentu penanganan penanganan pandemi covid-19 sejatinya masyarakat harus taat dalam hal penerapan

¹⁶ Zulham Ibrahim, “Wali Nanggroe Institution: The Role, Function and Strategy for Resolving Conflict in Aceh after the Peace”, *Jurnal Society*, Volume 1 Nomor 1, 2020, hlm. 315

¹⁷ Nicole Lurie, dkk, “Developing Covid-19 Vaccines at Pandemic Speed”, *The New England Journal of Medicine*, Volume 2 Nomor 3, 2020, hlm. 1971.

¹⁸ Bill Gates, “Responding to Covid-19- A Once in a Century Pandemic?”, *The New England Journal of Medicine*, Volume 2 Nomor 3, 2020, h. 1677.

disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan covid-19 yang diatur oleh Pemerintah Aceh.¹⁹ Berikut pengaturan pandemi covid-19 di Aceh sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan Covid-19, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh;
2. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 360/969/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Skala Provinsi untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019;
3. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 440/924/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Aceh;
4. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 440/1021/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Aceh;
5. Intruksi Gubernur Aceh Nomor 04/INSTR/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Aceh;
6. Intruksi Gubernur Aceh Nomor 19/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Level 4, Level 3 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus 2019 di Tingkat Gampong atau nama untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus 2019.
7. Surat Edaran Nomor 440/5944 tentang Larangan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak dalam Upaya Pencegahan Covid-19, Surat Edaran Nomor 440/4820 tentang Cegah Virus Corona melalui Ibadah, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Upaya penanganan pandemi covid-19 dengan pengaturan hukum di atas belum maksimal bahkan angka pandemi covid-19 angka statistik tidak turun. Kewenangan Wali Nanggroe Aceh semestinya digunakan dalam hal penyampaian pandangan, arahan dan nasihat kepada Gubernur Aceh untuk penanganan pandemi covid-19. Hal ini selaras dengan Pasal 124 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe Aceh menyatakan “Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, Wali Nanggroe dapat melakukan hubungan kerja yang bersifat: a. koordinatif; b. konsultatif; dan fungsional.”²⁰

Penyampaian pandangan, arahan dan nasihat sudah bisa melalui tiga pintu hubungan kerja dengan Gubernur Aceh selaku Kepala Pemerintah Aceh. Secara normatif yuridis bahwa koordinatif dimaksudkan untuk memberikan usul, saran dan pertimbangan terhadap kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan di Aceh. Dalam konteks koordinatif ini Wali Nanggroe Aceh sudah pernah meminta Pemerintah Aceh agar menjalankan rekomendasi Universitas Syiah Kuala terkait antisipasi dampak ekonomi di masa pandemi. Namun kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh selaku Kepala Pemerintah Aceh

¹⁹Tim Penulis, *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), hlm. 80.

²⁰Wawancara bersama Malek Mahmud selaku Wali Nanggroe Aceh di Meuligoe Lembaga Wali Nanggroe Aceh, tanggal 3 September 2021.

tidak berdampak pada sektor ekonomi, Pemerintah Aceh hanya sibuk penanganan disiplin, jam malam, dan hal-hal yang tidak substansi.²¹

Penyampaian pandangan, arahan, dan nasihat dalam hal konsultatif dijelaskan dalam normatif yuridis adalah Pemerintahan Aceh dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan adat di Aceh berkonsultasi dengan Wali Nanggroe. Konteks konsultatif ini berkaitan dengan pelaksanaan adat di Aceh, secara struktural memang Majelis Adat Aceh dibawah Lembaga Wali Nanggroe Aceh. Artinya MAA dan Pemerintah Aceh harus mendesaian pengaturan penanganan pandemi covid-19 dengan nuansa keadatan Aceh dengan kearifan lokal Aceh. Sampai sekarang Pemerintah Aceh belum mengeluarkan pengaturan dalam bingkai adat istiadat untuk menangani pandemic covid-19 di Aceh. Perubahan kebiasaan biasanya juga bisa dijadikan alternatif sosio kultural dengan pemahaman menjaga kesehatan diri. Pemerintah Aceh harus serius untuk menjaga masyarakat untuk menjaga kebersihan diri, keluarga.²²

Penyampaian pandangan, arahan, dan nasihat dalam hal fungsional dimaksudkan untuk percepatan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh. Percepatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan bukan saja pada tahap fisik akan non fisik dalam hal penanganan pandemi covid-19 di Aceh. Kebijakan Gubernur Aceh harus equivalen dengan pertimbangan-pertimbangan Wali Nanggroe Aceh sebagai penjaga kekhususan dan keistimewaan Aceh. Wali Nanggroe Aceh menyampaikan pandangan bahwa fungsional dimasa kritis ini harus ada prioritas yakni ekonomi, kemiskinan, dan pendidikan.²³

Penyampaian pandangan, arahan, dan nasihat yang selama ini dijalankan oleh pihak Lembaga Wali Nanggroe Aceh tidak begitu maksimal dengan alasan sebagai berikut: *Pertama*, selama ini penggunaan anggaran tidak substansial banyak dianggarkan operasional pegawai dari pada program-program keweangan LWNA dan hal ini menjadikan LWNA seakan-akan tidak bekerja untuk rakyat Aceh. Kemudian, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia baru saya menyetujui kodefikasi rekening LWNA. Artinya, revitalisasi kewenangan LWNA itu memang secara bertahap. *Kedua*, aktivasi LWNA yang selama ini terkesan tidak begitu progressif dalam melakukan pembicaraan ulang kepada Pemerintah Aceh dan DPRA, sebaiknya harus ada diskusi-diskusi ketiga lembaga ini dalam hal penanganan pandemic covid-19. *Ketiga*, Wali Nanggroe Aceh harus masuk kepada segmentasi kehidupan rakyat Aceh, supaya kewenangan-kewenangan LWNA yang selama ini dalam tataran normatif bisa dirasakan oleh publik Aceh.

PENUTUP

Ada dua permasalahan yang ingin disimpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Revitalisasi kewenangan LWNA dalam penanganan pandemi covid-19 harus diupayakan dengan sistematis, konseptual, dan aktual dikarenakan Wali Nanggroe Aceh menjadi penjaga kekhususan dan keistimewaan Aceh. Ke depan revitalisasi ini harus menjadi substansial program di

²¹Humas, Wali Nanggroe Minta Pemerintah Aceh Jalankan Rekomendasi Unsyiah, diakses melalui <https://unsyiah.ac.id/berita/wali-nanggroe-minta-pemerintah-aceh-jalankan-rekomendasi-unsyiah>, pada tanggal 10 September 2021.

²² Humas, "Sekda Aceh Dampingi Wali Nanggroe dan Kapolda Tinjau Vaksinasi Covid-19", diakses melalui <https://humas.acehprov.go.id/sekda-aceh-dampingi-wali-nanggroe-dan-kapolda-tinjau-vaksinasi-covid-19/>, pada tanggal 12 September 2021.

²³Humas, "Maksimalkan Keistimewaan dan Kekhususan Aceh Wali Nanggroe Adakan Rakor di Meulaboh", diakses melalui <https://acehbaratkab.go.id/berita/kategori/berita/>, pada tanggal 13 September 2021.

LWNA tidak boleh lagi menyampingkan revitalisasi kewenangan ini karena sosok figure Wali Nanggroe Aceh menjadi walinya rakyat Aceh.

Kebijakan Pemerintah Aceh dalam penanganan pandemi covid-19 sama sekali tidak melibatkan Wali Nanggroe Aceh, semestinya Gubernur Aceh berkolaborasi dengan Wali Nanggroe Aceh dalam penyampaian pandangan, arahan, dan nasihat untuk menekan angka statistik kenaikan covid-19 seperti amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kencana Prenada Media, 2017
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2018
- Tim Penulis, *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020

Jurnal dan Penelitian

- Ali Marwan dan Evlyn Martha Julianty, "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Legislasi*, Volume 15 Nomor 2, 2018
- Ali Mashuda, "Revitalisasi Keberadaan Fraksi dalam Optimalisasi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat di Bidang Legislasi", *thesis*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014.
- Arief Akbar, "Malek Mahmud Legal Strongmen?", *Jurnal Logos*, Volume 2 Nomor 1, 2019
- Badri Hasan Sulaiman, dkk, "Wali Nanggroe in Aceh: Is he the Real King or the Fake One? A Political Review", *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Volume 12, Nomor 10, 2020
- Bill Gates, "Responding to Covid-19- A Once in a Century Pandemic?", *The New England Journal of Medicine*, Volume 2 Nomor 3, 2020
- Dahlan A. Rahman, "Dynamics and Prospect of Wali Nanggroe Institution Post-Conflict in Aceh: Analysis of Policy and Educational Development", *Emerald Reach Proceeding Series*, Volume 1 Nomor 1, 2019
- Donny Michael, "Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 7 Nomor 1, 2016
- Hanif Fudin Azhar, "Rekontruksi Konseptual Peradilan sebagai Revitalisasi Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Keta tanegaraan Indonesia", *Jurnal Volksgeist*, Volume 1 Nomor 1, 2019

- M. Adly Abdullah, 'Kedudukan Wali Nanggroe Setelah Lahirnya UUPA', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 2, Agustus 2016.
- Muhammad Ridwansyah, *Perspektif Suku Non Aceh dalam Penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam Kerangka UUD Tahun 1945*, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Jakarta, DRPM Kemenristek, 2019
- Nicole Lurie, dkk, "Developing Covid-19 Vaccines at Pandemic Speed:", *The New England Journal of Medicine*, Volume 2 Nomor 3, 2020
- Zulham Ibrahim, "Wali Nanggroe Institution: The Role, Function and Strategy for Resolving Conflict in Aceh after the Peace", *Jurnal Society*, Volume 1 Nomor 1, 2020

Peraturan perundang-undangan

- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8).
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun (Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53).
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 18).

Wawancara

- Wawancara bersama Dr. Raviq Mohammad, selaku Staf Khusus Wali Nanggroe Aceh di Banda Aceh, tanggal 1 September 2021.
- Wawancara bersama Malek Mahmud selaku Wali Nanggroe Aceh di Meuligoe Lembaga Wali Nanggroe Aceh, tanggal 3 September 2021.

Internet

- Humas, "Maksimalkan Keistimewaan dan Kekhususan Aceh Wali Nanggroe Adakan Rakor di Meulaboh", diakses melalui <https://acehbaratkab.go.id/berita/kategori/berita/>, pada tanggal 13 September 2021.
- Humas, "Sekda Aceh Dampingi Wali Nanggroe dan Kapolda Tinjau Vaksinasi Covid-19", diakses melalui <https://humas.acehprov.go.id/sekda-aceh-dampingi-wali-nanggroe-dan-kapolda-tinjau-vaksinasi-covid-19/>, pada tanggal 12 September 2021.
- Redaksi Acehtrend, "Revisi UUPA, Penyatuan Jabatan Wali Nanggroe dan Gubernur Aceh". diakses melalui <https://www.acehtrend.com/2021/10/11/revisi-uupa-penyatuan-jabatan-wali-nanggroe-gubernur-aceh/>, tanggal 20 Oktober 2021.
- Humas, Wali Nanggroe Minta Pemerintah Aceh Jalankan Rekomendasi Unsyiah, diakses melalui <https://unsyiah.ac.id/berita/wali-nanggroe-minta-pemerintah-aceh-jalankan-rekomendasi-unsyiah>, pada tanggal 10 September 2021.

- Tim Humas, “Wali Nanggroe Minta Pemerintah Aceh Jalankan Rekomendasi Unsyiah”, diakses melalui <https://unsyiah.ac.id/berita/wali-nanggroe-minta-pemerintah-aceh-jalankan-rekomendasi-unsyiah>, tanggal 23-10-2020.
- Tim Redaksi, “ Antisipasi Dampak Ekonomi Akibat Covid-19, Wal Nanggroe Minta Jalankan Rekomendasi Unsyiah”, diakses melalui <https://aceh.tribunnews.com/2020/10/15/antisipasi-dampak-ekonomi-akibat-covid-19-wali-nanggroe-minta-aceh-jalankan-rekomendasi-unsyiah?page=3>, tanggal 23 Oktober 2020.